

**LANGKAH DIPLOMASI PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
DAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENANGANI  
PERMASALAHAN HUKUMAN PANCUNG YANG MENIMPA PARA TKI  
DI ARAB SAUDI**

Harya Bima Pratitakusuma

20130510171

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRACT**

Some of Indonesian citizens choose to improve their economic conditions by working abroad as Indonesian Migrant Workers (TKI), one of them in Saudi Arabia. Instead of getting high wages and being able to support the economy of the family, some of the TKIs actually get unpleasant treatment from their employers. In fact, some of them had to end their lives in the hands of the executioner because of his actions when defending/saving themselves. During the second period of the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo, the Indonesian government was always trying to resolve the problems that occur to Indonesian migrant workers who were awaiting beheadings through diplomatic measures. Both regimes use different styles and strategies, according to their respective characters.

Keywords: TKI, Saudi Arabia, Beheadings, Diplomacy

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Permasalahan seperti tingginya pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran yang cukup tinggi karena jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas, dan produktivitas rendah yang berdampak pada kemiskinan. Fenomena ini menjadi salah satu latar belakang mengapa banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memutuskan untuk mengadu nasibnya ke luar negeri dengan harapan mendapatkan upah yang cukup tinggi.

Meski jumlahnya tidak selalu signifikan, namun hingga tahun 2019 ini minat WNI untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih cukup tinggi. Dapat dibuktikan melalui data yang dihimpun dari Puslitfo BNP2TKI, pada tahun 2017 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sebanyak 261.820 orang, dengan pembagian laki-laki sebanyak 78.259 dan perempuan sebanyak 183.561.<sup>1</sup>

Arab Saudi hingga saat ini masih menjadi negara tujuan favorit para TKI. Hal ini tentunya tidak hanya semata-mata karena Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja untuk membantu warga negaranya dan Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan. Banyaknya WNI yang bekerja di Arab Saudi membuktikan bahwa kerjasama kedua negara di bidang ketenagakerjaan sebetulnya cukup menguntungkan kedua belah pihak dari berbagai aspek. Apalagi kerjasama ini sudah terjalin cukup lama. Apalagi didukung dengan kedekatan hubungan diplomatik kedua negara.

---

<sup>1</sup> Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI).

Hanya saja, hubungan baik kedua negara ini selalu tercoreng dengan adanya permasalahan dibalikinya. Tidak sedikit TKI di Arab Saudi yang kerap menerima tindakan tidak menyenangkan dari majikannya. Sebagai contohnya mulai dari TKI yang disiksa, TKI yang dilecehkan, hingga TKI yang tidak mendapatkan haknya seperti gaji, hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, bahkan hak untuk hidup dengan bahagia. Ketika keadaan mendesak, para TKI yang merasa keadaannya tertekan atau terusik langsung membela diri dengan berbagai macam cara. Kebanyakan, tindakan membela diri tersebut berakhir melukai atau berakibat hilangnya nyawa majikannya. Peristiwa ini kemudian sering disimpulkan bahwa TKI membunuh majikannya. Padahal hukum di Arab Saudi menerapkan Hukum Pidana Syariah, di mana salah satu aturannya adalah nyawa dibayar dengan nyawa.

Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan budaya kedua negara. Mulai dari cara berkomunikasi, bahasa yang digunakan, cara berinteraksi, dan batasan-batasan antara kaum laki-laki perempuan yang tidak banyak diketahui oleh WNI. Tidak heran jika sering terjadi miskomunikasi antar kedua belah pihak. Namun ketika TKI harus berhadapan dengan hukum Arab Saudi, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan banyak hal. Bahkan pemerintah Indonesia sering terlambat mengetahui jika terdapat WNI yang sudah terlanjur terjerat hukum pancung dan tinggal menunggu eksekusi. Permasalahan kemudian semakin memanas ketika WNI yang bersangkutan dieksekusi tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Nasib sebagian TKI kurang beruntung. Padahal TKI merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara. Perjalanan mereka dari perekrutan, pengiriman, penempatan, hingga pemulangan selalu menjadi sumber rezeki bagi banyak pihak. Hanya saja terdapat beberapa kendala, seperti salah satunya ancaman hilangnya nyawa akibat penyiksaan atau nasib mereka yang berakhir pada hukum pancung.<sup>2</sup>

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dua periode dan Presiden Joko Widodo mempunyai cara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan ini. Strategi yang mereka gunakan adalah melalui diplomasi. Mereka mengambil langkah ini karena tidak ingin merusak hubungan dekat kedua negara. Meski berbagai langkah diplomasi juga terus berupaya dilakukan, tidak selalu cara ini membuahkan hasil dan dapat menyelematkan nasib TKI yang terancam hukuman mati.

### **Hukum Pidana Islam dan Budaya di Arab Saudi**

Arab Saudi merupakan salah satu negara muslim terbesar. Dalam Dunia Islam, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang cukup strategis karena kekayaan alamnya dan terdapat Baitullah yang berdiri di kota Mekah. Sejak terbentuknya Kerajaan Arab Saudi pada 23 September 1932, pemerintah membuat kebijakan bahwa negara ini diatur oleh Hukum Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wawa, Jannes Eudes, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

<sup>3</sup> Prof. A. Qodri Azizy, 2004, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: L Teraju

Di dalam aturan syariat Islam sendiri mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>4</sup> Sehingga segala sesuatu yang diatur berdasarkan ajaran agama Islam. Al-Qur'an dan Hadist merupakan undang-undang dasar yang diterapkan di Arab Saudi. Sedangkan untuk hukum dasarnya adalah Syari'ah dan dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah. Dalam penerapan hukum Islam juga didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan hasil keputusan dari Hakim serta Mufti.

Dalam menerapkan hukuman juga mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai contohnya, jika seseorang melakukan perbuatan zina maka pelaku akan dirajam. Jika ada warga yang mencuri maka hukumannya potong tangan.<sup>5</sup> Begitu juga jika ada warga yang terbukti membunuh dengan sengaja, maka ia akan dijatuhi hukuman *qishash*.<sup>6</sup> Meski dinilai oleh banyak pihak cukup berat, namun berdasarkan Hukum Islam, dosa dari tindakan pembunuhan sejajar dengan tujuh macam dosa besar. Hukum Islam berpendapat bahwa nyawa seseorang merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang wajib untuk dibela, dijaga, dan dihormati. Maka dari itu jika seseorang melakukan pembunuhan, maka pelaku tersebut akan diberikan hukuman *qishash*, seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah : 178.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Saudi Arabian Law Overview, [http://www.saudilegal.com/saudilaw/01\\_law.html](http://www.saudilegal.com/saudilaw/01_law.html), diakses Jum'at, 12 Oktober 2018

<sup>5</sup> Sistem Peradilan di Arab Saudi, <https://news.detik.com/berita/1935221/ini-dia-sistem-peradilan-di-arab-saudi>, diakses Sabtu, 13 Oktober 2018

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*. UI Press: Jakarta

<sup>7</sup> Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Bulan Bintang: Jakarta

Secara umum pada saat berkomunikasi masyarakat Arab Saudi tipe orang yang sangat ekspresif. Memang sejak kanak-kanak, orang Arab dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan mereka apa adanya, misalnya dengan menangis atau berteriak. Selain itu, masyarakat Arab Saudi terbiasa berkomunikasi dengan suara yang cukup keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusannya, apalagi kepada orang yang mereka sukai.<sup>8</sup>

Dalam bersikap perempuan juga harus menjaga segala tingkah lakunya terutama dalam aktivitas sehari-hari. Perempuan di Arab Saudi tidak diperkenankan bersikap murah senyum. Kebanyakan perempuan di Arab Saudi terkesan serius, wajahnya tegang, dan tidak pernah senyum. Berbeda dengan masyarakat Indonesia. Senyum merupakan suatu hal yang lumrah karena menunjukkan sikap ramah dan bersahabat. Namun jika diterapkan di Arab Saudi, kebiasaan ini dapat diartikan "lain" oleh kaum laki-laki maupun masyarakat lokalnya.<sup>9</sup>

Tidak hanya itu saja, berjabat tangan, berkomunikasi dengan menatap mata yang cukup lama, apalagi bercanda hingga menyentuh fisik perempuan yang bukan muhrimnya merupakan hal yang tidak wajar.<sup>10</sup> Karena dalam ajaran Islam terdapat larangan untuk menyentuh yang bukan *muhrim/marhom*-nya. Tidak heran jika di tempat-tempat umum seperti kantor, universitas, hingga *restaurant* memiliki tempat terpisah bagi perempuan dan laki-laki.

---

<sup>8</sup> The Culture Of Saudi Arabia, <https://www.worldatlas.com/articles/the-culture-of-saudi-arabia.html>, diakses Sabtu, 16 Maret 2019

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **TKI di Arab Saudi dan Permasalahan yang Menimpa TKI**

Arab Saudi merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Pada tahun 1974 terjadi peristiwa *Boom Oil* di Arab Saudi dan negara teluk lainnya. *Boom Oil* merupakan peristiwa melonjaknya harga minyak di pasar internasional. Peristiwa ini kemudian berdampak pada meningkatnya perekonomian warga negara Arab Saudi serta munculnya masyarakat kelas menengah. Kebanyakan dari masyarakat tersebut membutuhkan pembantu rumah tangga untuk mengurus rumah mereka.

Indonesia dengan Arab Saudi telah menjalin hubungan sejak Arab Saudi mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Meski hubungan kedua negara baru terjalin resmi pada tahun 1950, namun pengimigrasian TKI ke Arab Saudi sudah terjadi sejak zaman penjajahan, yaitu tahun 1887. Pada awalnya WNI dikirimkan ke Suriname dan Amerika Selatan sebagai buruh kontrak. Para WNI ini ditugaskan sebagai pekerja kebun untuk menggantikan budak-budak dari Afrika yang telah dibebaskan. Semakin lama negara tujuan WNI bertambah, salah satunya adalah Arab Saudi.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Puslitfo BNP2TKI, pada tahun 2009 hingga 2018 terdapat TKI di Arab Saudi yang jumlahnya cukup banyak, meskipun fluktuatif. Para TKI tersebut terbagi dalam bidang formal dan informal. Namun pada penulisan kali ini hanya TKI informal yang menjadi fokusnya.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, minat dari kaum laki-laki dan perempuan juga cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>11</sup> Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>, Minggu, 14 Oktober 2018

**Jumlah TKI formal dan informal di Arab Saudi tahun 2009-2018  
berdasarkan jenis kelamin**

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2009	148.600	528.984
2	2010	103.188	451.120
3	2011	124.684	376.686
4	2012	214.825	279.784
5	2013	235.170	276.998
6	2014	186.243	243.629
7	2015	108.965	166.771
8	2016	89.059	145.392
9	2017	78.258	184.641
10	2018	84.644	179.448

Sumber: Subid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan & Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI)<sup>12</sup>

Data tersebut membuktikan bahwa semangat para kaum perempuan untuk bekerja cukup tinggi. Jumlah tersebut terbukti pada tahun 2009 mencapai 528.984 orang. Meskipun setelah tahun 2011 jumlahnya menurun hingga menyentuh angka 3000 orang, tetap saja jumlahnya jauh lebih banyak jika dibanding TKI laki-laki.<sup>13</sup> Angka yang tidak sedikit tersebut membuktikan bahwa para pahlawan devisa negara tersebut tidak hanya semata-mata mencari nafkah semata. Namun kuatnya hubungan diplomatik antar kedua negara dan saling menguntungkan. Hanya saja, permasalahan-permasalahan juga kerap muncul menimpa para TKI di Arab Saudi. Bahkan di antara mereka harus mengakhiri hidupnya dengan dieksekusi hukum pancung.

Beberapa TKI yang dieksekusi di antaranya adalah: (1) Ruyati, TKI legal asal Bekasi dan dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena terbukti membunuh

<sup>12</sup> Susiana, Sali, 2016, *Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

<sup>13</sup> *Ibid.*



majikannya dengan alasan membela diri di Mekkah, Arab Saudi.<sup>14</sup> (2) Satinah, TKI asal Semarang yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya di Arab Saudi. Agar bisa terbebas dari hukuman mati, Satinah diminta untuk membayar uang denda (*diyath*) sebesar Rp. 21 miliar.<sup>15</sup> (3) Kasus ini juga mengingatkan pada Darsem, TKI legal dari Subang yang juga dituduh membunuh majikan pada 2007 dan dijatuhi hukuman mati. Namun kemudian pada 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar kompensasi senilai dua juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.<sup>16</sup> (4) Kasus yang baru saja terjadi adalah Zaini, TKI yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi. Ia dituduh membunuh majikannya pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman pancung pada 2018.<sup>17</sup> (5) Tuti Tursilawati, TKI asal Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat, juga terancam hukuman pancung setelah dituduh membunuh majikannya pada 11 Mei 2010. Ia melakukan ini untuk melindungi diri dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikannya tersebut.<sup>18</sup>

Menurut data dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 terdapat 103 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi dengan

---

<sup>14</sup> Ruyati Dipancung, 26 TKI Lain di Ambang Ajal, <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/227813-ruyati-dipancung-23-tki-lainnya-terancam>, diakses Senin, 5 Maret 2018.

<sup>15</sup> Bebas dari Hukuman Mati, TKI Satinah Tiba di Tanah Air Hari Ini, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/02/11595281/Bebas.dari.Hukuman.Mati.TKI.Satinah.Tiba.di.Tanah.Air.Hari.Ini>, diakses Kamis, 3 Mei 2018.

<sup>16</sup> Darsem Kembali ke Keluarga, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/07/110713\\_darsemfree](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110713_darsemfree), diakses Selasa, 6 Maret 2018.

<sup>17</sup> Kronologi Kasus TKI Zaini hingga Dieksekusi Mati di Arab Saudi, <https://news.detik.com/berita/d-3924173/kronologi-kasus-tki-zaini-hingga-dieksekusi-mati-di-arab-saudi>, diakses Kamis, 26 April 2018.

<sup>18</sup> TKI Tuti Tursilawati Segera Dieksekusi? Ini Kata Kemlu, <https://news.detik.com/berita/2891083/tki-tuti-tursilawati-segera-dieksekusi-ini-kata-kemlu>, diakses Kamis, 3 Mei 2018.

berbagai kasus yang melatarbelakanginya. Dari jumlah tersebut pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan 85 WNI dari hukuman mati. Kemudian terdapat enam WNI yang sudah dieksekusi tanpa notifikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Hingga saat ini masih terdapat 13 WNI yang terancam hukuman mati, salah satunya adalah TKW Eti binti Toyib, TKW asal Majalengka yang ditahan sejak tahun 2002 karena dituduh membunuh majikannya dengan memberikan racun makanan yang akan disajikan untuk majikannya.<sup>19</sup>

Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus mengupayakan langkah diplomasi agar Eti dan TKI lainnya yang sudah tinggal menunggu eksekusi tidak berakhir di tangan algojo. Apalagi, seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia pada 30 Oktober 2018, dalam pelaksanaan eksekusi pemerintah Arab Saudi juga tidak selalu menerima notifikasi kapan TKI akan dijatuhi hukuman pancung. Berdasarkan hukum di Arab Saudi, hanya empat pihak yang berhak mendapatkan notifikasi sebelum eksekusi yaitu ahli waris korban, jaksa penuntut umum, kepala penjara, dan lembaga pemaafan.<sup>20</sup>

### **Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia**

Presiden Susilo Bambang Yudhyono merupakan Presiden Indonesia ke enam yang terpilih melalui pemilihan umum pada Oktober 2004. Pada Oktober 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhyono kembali terpilih dan menjabat hingga Oktober 2014. Pada masa akhir jabatannya terdapat 632.172 TKI yang bekerja di

---

<sup>19</sup> Eksekusi Tuti Tursilawati: Cerita pertemuan terakhir dengan ibunda dan keinginan berziarah ke makam, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46020157>, diakses Jum'at, 22 Februari 2019

<sup>20</sup> Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati, Ini Alasan Arab Saudi Tak Beri Pemberitahuan Resmi, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/01/tuti-tursilawati-dieksekusi-mati-ini-alasan-arab-saudi-tak-beri-pemberitahuan-resmi>, diakses Jum'at, 22 Februari 2019

Arab Saudi. Dari sejumlah TKI tersebut terdapat 23.760 orang yang bermasalah. Namun jumlah tersebut tentunya belum mencakup para TKI yang bekerja di Arab Saudi dengan cara ilegal. Dari puluhan ribu kasus tersebut masih terdapat TKI yang menunggu eksekusi hukuman pancung. Pada masa akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau pada Oktober 2014 masih meninggalkan tanggung jawab terkait nasib TKI yang terancam dan menunggu eksekusi hukuman pancung sebanyak 249 WNI.<sup>21</sup> Dari sini kemudian dapat disimpulkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih meninggalkan tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintahan rezim selanjutnya, yaitu pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo sama-sama mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan TKI dan menjadi acuan pemerintah di masing-masing era untuk bertindak dalam melindungi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpa para TKI di luar negeri, seperti salah satunya di Arab Saudi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Kemudian pada rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang

---

<sup>21</sup> TKI Satinah menunggu hukuman mati di Saudi, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/02/140211\\_nasib\\_tki\\_satinah\\_mati](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140211_nasib_tki_satinah_mati), diakses Jum'at, 27 April 2018

Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2012. Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 ini dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksanaannya ke depan.<sup>22</sup>

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tercantum kebijakan moratorium yang berfungsi untuk melindungi rakyatnya. Pada 1 Agustus 2011 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul setelah TKW Ruyati dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi tanpa memberikan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia. Padahal beberapa bulan sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memohon kepada Arab Saudi untuk melindungi WNI melalui pidatonya pada *100<sup>th</sup> International Labour Organization Conference* di Geneva, Switzerland.<sup>23</sup>

Kebijakan moratorium diberlakukan dalam jangka waktu sementara sampai sistem pengiriman TKI ke luar negeri diperbaiki dan MoU tentang perlindungan TKI ditandatangani oleh Arab Saudi.<sup>24</sup> Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya perbaikan dan evaluasi sistem pengiriman TKI, termasuk pengawasan ketat terhadap perusahaan yang memberangkatkan TKI ke luar negeri. Di samping itu pemerintah Indonesia juga ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh.

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

<sup>23</sup> 100th Session of the International Labour Conference, 1-17 June 2011, <https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/lang-en/index.htm>, diakses Selasa, 5 Februari 2019

<sup>24</sup> Shobicshatul, Dr. Aminah, 2012, *Moratorium TKI ke Arab Saudi: REAKSI atau STRATEGI?* dalam Majalah KJRI Jeddah Suara Indonesia Edisi 2

Dalam beberapa kesempatan pihak dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi juga melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Pada 28 Mei 2011 di Jeddah diselenggarakan pertemuan antara Indonesia dengan Arab Saudi untuk membahas MoU tentang penempatan dan perlindungan TKI. Proses dalam rangka mencapai kesepakatan MoU dilakukan dengan dua cara, yaitu *Preliminary Senior Official Meeting Indonesia-Arab Saudi (Preliminary SOM)* dan *Joint Working Committee (JWC)*.<sup>25</sup>

*Preliminary Senior Official Meeting Indonesia-Arab Saudi (Preliminary SOM)* diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 28 Mei 2011. Pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan, yang pertama, kedua negara akan melakukan evaluasi dan membahas lebih lanjut tentang ketenagakerjaan. Kedua, Indonesia dan Arab Saudi membentuk MoU ketenagakerjaan dalam jangka waktu 6 bulan. Dua bulan kemudian, pada 10-13 Juli 2011 di Riyadh kedua negara melaksanakan *JWC* di bidang ketenagakerjaan sebagai bentuk tindak lanjut dari *Preliminary SOM*. Dalam pertemuan ini pemerintah Indonesia mengajukan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*, dengan tujuan:

1. Membentuk mekanisme efektif untuk penempatan TKI sektor domestik,
2. Memastikan adanya perlindungan hak TKI sektor domestik dan majikan,

---

<sup>25</sup> Penguatan Peranan Tugas dan Fungsi Kementerian luar Negeri RI dalam Rangka Meningkatkan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri: Tantangan Budie Utama Razak Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, <http://www.kadinindonesia.or.id/seminartki/Bahan%20KEMLU,%20Tatang%20Budie.pdf>, diakses Jum'at, 1 Februari 2019

3. Menetapkan standar perjanjian kerja sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh kedua negara baru disetujui oleh Arab Saudi pada 26 Agustus 2013. Namun, pengesahan perjanjian tersebut bukan berarti merubah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencabut kebijakan moratoriumnya. Hingga Presiden Joko Widodo menjabat, kebijakan moratorium masih terus diterapkan. Tidak jarang Arab Saudi meminta Indonesia untuk mencabut kebijakan moratoriumnya, seperti yang dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi. Ia mengharapkan moratorium pengiriman TKI dapat segera dicabut demi kemaslahatan kedua negara. Moratorium dinilai juga mempengaruhi pihak lain seperti bank-bank yang biasa mengirimkan uang TKI ke Indonesia, dan berkurangnya jumlah penumpang pesawat.<sup>27</sup>

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang menimpa TKI jumlahnya tidak sedikit. Dalam periode hampir 10 tahun terdapat 7 TKI yang dieksekusi tanpa memberitahukan notifikasi pada pemerintah Indonesia. Pada tahun 2007 TKW Darsem asal Subang Jawa Barat dinyatakan membunuh majikan laki-lakinya, warga Yaman yang bermukim di Arab Saudi. Darsem membunuh dengan dalih membela diri karena hampir diperkosa. Dua tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 6 Mei 2009, vonis pengadilan menyatakan bahwa Darsem

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Dubes Saudi Harapkan Moratorium Pengiriman TKI Dicabut, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171214201135-120-262493/dubes-saudi-harapkan-moratorium-pengiriman-tki-dicabut>, diakses Minggu, 17 Februari 2019

terbukti bersalah telah membunuh majikannya. Berdasarkan hasil sidang di pengadilan Riyadh, Darsem dijatuhi hukuman pancung.<sup>28</sup>

Indonesia menunjuk pengacara Arab Saudi untuk memberikan pendampingan pada Darsem, mengajukan kerjasama dengan pihak KBRI Riyadh, *Lajnah Islah* (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh, dan Gubernur Riyadh untuk melakukan negosiasi pada keluarga korban. Upaya diplomasi pemerintah Indonesia yang intens membuahkan hasil. Setelah upaya selama dua tahun, akhirnya ahli waris korban memberikan maaf dan Darsem diharuskan membayar *diyath* sebesar Rp. 4,7 Miliar.<sup>29</sup>

Di tahun yang sama Indonesia juga dikejutkan dengan informasi TKW Ruyati yang dihukum pancung karena melindungi dirinya dari majikannya yang bersikap semena-mena. Selain sering dimarahi dan diperlakukan dengan tidak pantas, gaji Ruyati juga tidak dibayarkan selama tiga bulan dengan nominal sebesar Rp. 8,9 juta. Berdasarkan hasil investigasi dari staf Kepolisian Sektor Al-Mausur Mekah, tindakan Ruyati merupakan kasus yang berat. Selama Ruyati mendekam di penjara dan melewati sidang, pihak dari KBRI mengirimkan nota diplomatic kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk menolong Ruyati. Selain itu pemerintah Arab Saudi beberapa kali juga mengunjungi pihak keluarga untuk memohon ampunan. Hasil negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Pada

---

<sup>28</sup> Nyaris Diperkosa, TKI Saudi Terpaksa Membunuh, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/205873-terancam-diperkosa-wni-ini-terpaksa-membunuh>, diakses Jum'at, 1 Februari 2019

<sup>29</sup> Pemerintah Akan Segera Selesaikan Kasus Darsem, <https://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/pemerintah-akan-segera-selesaikan-kasus-darsem/4241>, diakses Jum'at, 1 Februari 2019

18 Juni 2011 Ruyati akhirnya dieksekusi tanpa melayangkan pemberitahuan kepada Indonesia.

Kasus yang terjadi pada Darsem juga mengingatkan permasalahan yang menimpa pada Satinah. TKW asal Ungaran, Jawa Tengah tersebut juga sempat terancam hukum pancung lantaran dinyatakan membunuh majikannya pada tahun 2007. Satinah melawan majikannya karena sering mendapatkan penyiksaan seperti dibenturkan kepalanya ke tembok. Satinah juga melarikan diri dari rumah majikannya dengan membawa uang majikannya sebesar Rp. 14 juta Rupiah. Namun pada akhirnya Satinah menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke kantor polisi setempat. Meski pemerintah Indonesia baru mengetahui permasalahan yang menimpa Satinah setelah dinyatakan bersalah, namun langkah negosiasi terus ditempuh agar kasus yang menimpa Ruyati tidak terjadi lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi. Selain itu kedua anak Satinah juga mengirimkan surat permohonan kepada keluarga majikannya. Demi mendapatkan akses yang lebih dekat dengan pihak keluarga, Gubernur setempat pun juga terlibat.

Gencarnya proses negosiasi akhirnya membuahkan hasil. Satinah akhirnya dimaafkan oleh pihak keluarga dengan syarat membayar *diyath* sebesar Rp. 45 miliar Rupiah. Namun karena nominal tersebut dirasa terlalu tinggi, akhirnya *diyath* diturunkan menjadi Rp. 21 miliar Rupiah.<sup>30</sup> Kabar ini juga mendapatkan respon positif dari Indonesia. Berbagai pihak seperti instansi pemerintah, organisasi dan LSM, seperti masyarakat luas langsung mengadakan penggalangan

---

<sup>30</sup> Indonesia pays 'blood money' to save maid from execution in Saudi Arabia, <https://edition.cnn.com/2014/04/03/world/meast/saudi-arabia-indonesia-maid/index.html>, diakses Senin, 11 Februari 2019



dana untuk meringankan beban Satinah. Pemerintah Indonesia pun sempat memohon kepada pihak keluarga untuk memberikan longgaran waktu pembayaran pada keluarga korban. Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada 2 September 2015 Satinah dapat diterbangkan ke Jakarta.<sup>31</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat kasus lainnya yang menimpa TKW asal Bangkalan, Madura, Siti Zaenab. Siti Zaenab harus melewati proses hukum lebih lama. Kasus yang menimpa Siti Zaenab bermula sejak tahun 1998 ketika ia menerima kekerasan dari majikan perempuannya. Bermula pada peristiwa saat Siti Zaenab tengah memasak air pada waktu Shubuh, tanpa alasan yang jelas majikannya tiba-tiba memukul kepala, menjambak, dan mencekik leher Siti Zaenab. Karena merasa tersiksa dan kesakitan, Siti Zaenab kemudian menusuk perut majikannya dengan pisau.<sup>32</sup>

Setelah kabar buruk tersebut terdengar hingga Indonesia, pemerintah Indonesia langsung melakukan upaya negosiasi pada tahun 1999. Pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur kemudian langsung bernegosiasi dengan raja Arab Saudi melalui telpon. Selain itu Kepala Perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah juga mengirimkan surat pada Emir di Mekkah dan Madinah untuk mendorong pemberian maaf bagi Siti Zainab.

Meskipun upaya diplomasi terus dilakukan namun pihak keluarga korban enggan untuk memaafkan Siti Zaenab. Mereka kemudian memberikan kelonggaran bahwa yang menentukan Siti Zaenab dimaafkan atau tidak adalah

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Kronologi Siti Zaenab hingga Dihukum Mati di Arab Saudi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-di-arab-saudi>, diakses Jum'at, 15 Februari 2019

anak bungsu majikan. Hanya saja jawaban tersebut baru dapat diberikan setelah putra bungsu tersebut memasuki usia akil balig. Sembari menunggu putra bungsu majikan dapat memberikan hak suaranya untuk memaafkan atau menolak pemaafan, Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan negosiasi. Pemerintah Indonesia tercatat juga pernah menawarkan pembayaran *diyath* melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar 600 ribu Real atau sekitar dua miliar Rupiah.

Setelah tertunda proses hukumnya, tepat pada tahun 2013 putra bungsu majikan Siti Zaenab memasuki usia akil balig. Sayangnya, keputusan yang diambil sama seperti anggota keluarganya, yaitu Putra majikan tersebut menolak untuk memberi maaf kepada Siti Zaenab di Pengadilan.<sup>33</sup> Setelah mendekam 16 tahun di dalam penjara, pada 14 April 2015 akhirnya eksekusi hukum pancung Siti Zaenab dilaksanakan.

Dua hari kemudian atau pada 16 April 2015, kembali Arab Saudi mengeksekusi hukum mati TKW Karni asakk Brebes, Jawa Tengah. Karni dieksekusi karena tindakannya yang dilakukan pada tahun 2012 ketika ia menggorok leher anak balita majikannya dengan pisau dapur. Kedua majikannya sedang bekerja dan kakaknya sedang bersekolah. Mendengar kabar tersebut, dalam kondisi panik Khalid langsung mengemudi pulang dan mengalami kecelakaan. Khalid menabrak seorang pengendara motor yang membonceng putrinya berusia 6 tahun hingga keduanya tewas.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Siti Zaenab Dieksekusi Mati, Pemerintah Diminta Stop Kirim TKI ke Arab Saudi, <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/15/11591941/Siti.Zaenab.Dieksekusi.Mati.Pemerintah.Diminta.Stop.Kirim.TKI.ke.Arab.Saudi>, diakses Jum'at, 15 Februari 2019

<sup>34</sup> Kemlu: TKI Karni Juga Dipancung Saudi Tanpa Beri Tahu RI, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tnki-karni-juga-dipancung-saudi-tanpa-beri-tahu-ri?>, diakses Sabtu, 16 Februari 2019

Permasalahan ini tergolong berat karena juga menjadi sorotan masyarakat Arab Saudi. Pemerintah Indonesia kemudian berupaya melakukan negosiasi kepada pihak keluarga korban. Selain itu pemerintah Indonesia juga menawarkan *diyath* yang akan diberikan pada pihak keluarga. Presiden Joko Widodo pun juga mengirimkan surat ke Raja Arab Saudi sebanyak dua kali. Karena pihak keluarga tetap tidak mau memberikan maaf, akhirnya Karni dieksekusi pada 16 April 2015 waktu setempat.<sup>35</sup>

Tiga tahun setelah eksekusi tanpa notifikasi terakhir dijatuhkan pada Karni, eksekusi pada WNI kembali terjadi pada Zani, TKI asal Bangkalan, Madura yang telah bekerja menjadi supir di sebuah keluarga sejak tahun 1992. Setelah 12 tahun bekerja, pada 13 Juli 2004 Zaini ditangkap oleh kepolisian Mekah dengan tuduhan membunuh majikan laki-lakinya. Zaini dijatuhi hukuman *qishash* pada tahun 2008. Meski pihak dari KJRI Jeddah sudah mendapatkan kabar sejak tahun 2008, namun pemerintah Indonesia baru dapat menjumpai Zaini pada tahun 2009. Upaya negosiasi dilakukan dengan cara mengirimkan surat permohonan pada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Setelah Indonesia mengetahui bahwa Zaini merupakan korban fitnah dan mendapat tekanan dari kepolisian Arab Saudi untuk mengakui tindakan yang tidak diperbuatnya, akhirnya KJRI Jeddah langsung mengupayakan langkah pembebasan.<sup>36</sup> Pemerintah Indonesia juga berkali-kali mengunjungi Zaini ke

---

<sup>35</sup> Detik-detik Kritis Sebelum TKI Karni Dieksekusi Algojo, <https://nasional.tempo.co/read/658366/detik-detik-kritis-sebelum-tki-karni-dieksekusi-algojo/full&view=ok>, diakses Sabtu, 16 Februari 2019

<sup>36</sup> Kronologi Kasus TKI Zaini hingga Dieksekusi Mati di Arab Saudi, <https://news.detik.com/berita/d-3924173/kronologi-kasus-tki-zaini-hingga-dieksekusi-mati-di-arab-saudi>, diakses Selasa, 19 Februari 2019

pencara, 2 kali penunjukan pengacara, dan memfasilitasi keluarga korban untuk menemui Zaini untuk menemui keluarga majikannya agar mau memberikan maaf pada Zaini.

Berhubung langkah pendekatan melalui delegasi pemerintah Indonesia tidak kunjung membuahkan hasil, langkah negosiasi selanjutnya juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi pada saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi di tahun 2015 dan 2017. Pemerintah Indonesia meminta secara langsung kepada Raja Arab Saudi untuk membantu proses pengampunan pihak keluarga korban. Di tahun 2017 Presiden Joko Widodo juga sempat mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi agar pemerintah Indonesia dapat mencari bukti-bukti baru.

Meski pada September 2017 Presiden Joko Widodo menyatakan menemukan bukti bahwa Zaini merupakan korban tuduhan dan meminta untuk melakukan peninjauan ulang, namun akhirnya pada 18 Maret 2018 Zaini tetap dijatuhi hukuman *qishash*.<sup>37</sup>

Masih di tahun yang sama, terdapat kabar buruk dari Arab Saudi terkait TKW Tuti Tursilawati yang dijatuhi hukuman pancung karena dianggap membunuh majikannya. Kejadian bermula pada saat Tuti merasa risih lantaran sering menerima pelecehan seksual dari Ayah majikannya. Tuti membunuh ayah majikannya dengan mendorongnya yang tengah duduk di kursi roda. Lantaran ketakutan, Tuti langsung melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp. 118 jura Rupiah. Dalam perjalanan Tuti bertemu dengan kelompok sembilan orang

---

<sup>37</sup> Begini Kronologi Tindakan All Out Pemerintah Agar TKI Zaini Terhindar Eksekusi Mati, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/begini-kronologi-tindakan-all-out-pemerintah-agar-tki-zaini-terhindar-eksekusi-mati-1/full>, diakses Selasa, 19 Februari 2019

yang berjanji akan mengantar Tuti hingga Mekah. Namun pada kenyataannya Tuti dibawa ke sebuah rumah dan diperkosa. Selain itu harta Tuti juga diambil oleh kelompok tersebut.<sup>38</sup> Tuti ditetapkan bersalah dengan tuduhan mencoba melakukan pembunuhan kepada majikannya yang tidak melakukan kekerasan.

Setelah Tuti dijatuhi hukuman *qishash* oleh Mahkamah Umum, pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah menunjuk stagasnya di Kota Thaif untuk memberikan pendampingan pada Tuti. Selain itu pemerintah Indonesia juga menunjuk seorang pengacara untuk mengawal proses hukum dan siding.

Proses negosiasi pada Pemerintah Arab Saudi sudah dilakukan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pada 6 Oktober 2011 dengan cara mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi. Selain itu Duta Besar Republik Indonesia di Riyadh dan Konjen Republik Indonesia Jeddah juga mengirimkan surat kepada menteri dalam negeri, menteri kehakiman, putra mahkota I dan wakil perdana menteri Arab Saudi dengan total kiriman sebanyak empat kali. Pihak negosiasi juga pernah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-3, B.J. Habibie karena kedekatannya dengan salah satu pangeran Arab Saudi yang merupakan keponakan Raja Arab Saudi. Kemudian pada tahun 2017, surat kepada Raja Arab Saudi kembali dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo.<sup>39</sup>

Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi keluarga Tuti untuk menjenguk Tuti di penjara. Setelah proses negosiasi yang panjang, namun pada akhirnya Tuti

---

<sup>38</sup> Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati, <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati/full&view=ok>, diakses Jum'at, 22 Februari 2019

<sup>39</sup> *Ibid.*

tetap dieksekusi pada 29 Oktober 2018. Pada eksekusi ini pun pemerintah Indonesia juga tidak diberikan notifikasi.

Dari ketujuh kasus yang menimpa TKI Arab Saudi, selain Darsem dan Satinah yang berhasil dibebaskan, para TKI yang dieksekusi tidak pernah memberikan kabar kepada pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Kecaman datang dari berbagai pihak, hingga perwakilan Arab Saudi di Indonesia seperti Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia pun kerap dipanggil untuk memberikan klarifikasinya. Selain itu Indonesia juga kerap melayangkan protes pada Arab Saudi, meskipun tidak pernah mendapatkan respon maupun klarifikasi.

### **Kesimpulan**

Upaya diplomasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar para pahlawan devisa negara yang mencari nafkah di negeri Minyak tersebut dapat hidup dengan aman dan tentram. Terlebih tujuan utama mereka mencari nafkah di Arab Saudi adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya. Selain itu, kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi juga menunjukkan kedekatan hubungan diplomatic kedua negara.

Meski terdapat permasalahan yang cukup kompleks yang menimpa para TKI di Arab Saudi dan membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, di negara tersebut masih terdapat WNI yang jumlahnya tidak sedikit. Meski terdapat 2 TKI yang berhasil dibebaskan dan terdapat 5 TKI lainnya yang sudah dieksekusi hukuman mati, di

Arab Saudi masih terdapat 103 WNI lainnya yang tercatat menunggu dijatuhi hukuman *qishash*, salah satunya adalah Etty, TKW asal Majalengka.<sup>40</sup>

Jika melihat dari langkah negosiasi yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia pada para TKI yang sudah dieksekusi maupun berhasil dibebaskan, pendekatan dari pemerintah Indonesia sudah cukup baik meskipun belum dapat terlaksana dengan efektif. Beberapa kali pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan negosiasi dengan pihak keluarga korban, atau menunjuk perwakilan dari Arab Saudi untuk menemui pihak keluarga korban.

Pendekatan tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh masing-masing pemerintah. Jika saja Presiden Republik Indonesia mampu dan terus melakukan pendekatan dengan Raja Arab Saudi, baik melalui surat, menghubungi secara langsung, maupun berkomunikasi ketika bertemu seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara intens, kemungkinan akan sedikit berdampak baik.

Selain itu, jika Indonesia terus berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Arab Saudi diharapkan dapat memudahkan komunikasinya dengan pemerintah Arab Saudi, seperti yang terjadi pada saat Presiden B.J. Habibie melakukan negosiasi dengan salah satu pangeran Arab Saudi. Hasilnya, hukum pancung yang akan dijatuhkan pada Tuti dapat ditunda. Hanya saja pemerintah selanjutnya tidak kembali melanjutkan proses diplomasinya. Sehingga langkah diplomasi yang telah ditempuh oleh Presiden Habibie tidak dapat dilanjutkan dengan baik dan akhirnya Tuti tetap dieksekusi.

---

<sup>40</sup> Eksekusi Tuti Tursilawati: Cerita pertemuan terakhir dengan ibunda dan keinginan berziarah ke makam, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46020157>, Senin, 15 Oktober 2018

Harapannya jika pemerintah Indonesia melalui Presiden yang menjabat terus mengupayakan pendekatan dengan pemerintah Arab Saudi, maka hubungan kedua negara akan terjalin semakin erat. Sehingga ketika terjadi permasalahan seperti ini dapat dikomunikasikan secara baik, terlebih pemegang kunci pada permasalahan ini adalah bukan pihak pemerintah Arab Saudi, namun keluarga korban.

### **Daftar Pustaka**

#### **- Buku**

Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*.

Bulan Bintang: Jakarta.

Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*.

UI Press: Jakarta.

Prof. A. Qodri Azizy, 2004, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan*

*Hukum Umum*. Jakarta: L Teraju.

Shobicshatul, Dr. Aminah, 2012, *Moratorium TKI ke Arab Saudi: REAKSI atau*

*STRATEGI?* dalam Majalah KJRI Jeddah Suara Indonesia Edisi 2.

Susiana, Sali, 2016, *Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal*. Jakarta: Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Wahyu Susilo, Anis Hidayah, dan Mulyadi, 2013, *Selusur Kebijakan (Minus)*

*Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Migrant Care dan Tahir

Foundation.



Wawa, Jannes Eudes, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- **Dokumen**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI).

- **Website**

*100th Session of the International Labour Conference*, 1-17 June 2011,  
<https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/lang--en/index.htm>. Diakses Selasa, 5 Februari 2019.

*Bebas dari Hukuman Mati, TKI Satinah Tiba di Tanah Air Hari Ini*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2015/09/02/11595281/Bebas.dari.Hukuman.Mati.TKI.Satinah.Tiba.di.Tanah.Air.Hari.Ini>. Diakses Kamis, 3 Mei 2018.

*Darsem Kembali ke Keluarga*,  
[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/07/110713\\_darsemfree](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110713_darsemfree).  
Diakses Selasa, 6 Maret 2018.

*Indonesia pays 'blood money' to save maid from execution in Saudi Arabia,*

<https://edition.cnn.com/2014/04/03/world/meast/saudi-arabia-indonesia-maid/index.html>. Diakses Senin, 11 Februari 2019.

*Kronologi Kasus TKI Zaini hingga Dieksekusi Mati di Arab Saudi,*

<https://news.detik.com/berita/d-3924173/kronologi-kasus-tki-zaini-hingga-dieksekusi-mati-di-arab-saudi>. Diakses Kamis, 26 April 2018.

*Ruyati Dipancang, 26 TKI Lain di Ambang Ajal,*

<https://www.viva.co.id/indepth/fokus/227813-ruyati-dipancang-23-tki-lainnya-terancam>. Diakses Senin, 5 Maret 2018.

*Saudi Arabian Law Overview,* [http://www.saudilegal.com/saudilaw/01\\_law.html](http://www.saudilegal.com/saudilaw/01_law.html).

Diakses Jum'at, 12 Oktober 2018.

*Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI,*

<http://www.bnptki.go.id/read/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>. Diakses Minggu, 14 Oktober 2018.

*Sistem Peradilan di Arab Saudi,* <https://news.detik.com/berita/1935221/ini-dia-sistem-peradilan-di-arab-saudi>.

Diakses Sabtu, 13 Oktober 2018.

*The Culture of Saudi Arabia,* <https://www.worldatlas.com/articles/the-culture-of-saudi-arabia.html>.

Diakses Sabtu, 16 Maret 2019.

*TKI Tuti Tursilawati Segera Dieksekusi? Ini Kata Kemlu,*

<https://news.detik.com/berita/2891083/tki-tuti-tursilawati-segera-dieksekusi-ini-kata-kemlu>. Diakses Kamis, 3 Mei 2018.